

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan Ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Ada tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu : (1) proses, (2) output per kapita, dan (3) jangka panjang.

Boediono(1992) memberikan batasan Pertumbuhan Ekonomi yaitu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dari sini dapat kita pahami bahwa definisi tersebut menekankan pada tiga aspek yakni proses, output perkapita, dan jangka panjang artinya bahwa perekonomian itu mengalami perubahan waktu ke waktu. Adanya kenaikan output perkapita berarti ada dua sisi yang penting untuk di ketahui yaitu output dan jumlah penduduknya.

Sedangkan Simon Kuznet mendefinisikan Pertumbuhan Ekonomi suatu negara sebagai kemampuan negara itu untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang terus meningkat bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini berdasarkan pada kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang di butuhkan.

Menurut Adi (2008:15) proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD.

Kuncoro (2004:26) juga menyebutkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling besar 20%. Kenyataan inilah yang menimbulkan perilaku asimetris pada pemerintah daerah. Untuk melihat apakah terjadi indikasi inefisiensi pada dana transfer tersebut, dapat dilihat dari respon pengeluaran pemerintah yang lebih dikenal dengan teori *Flypaper Effect*.

Menurut UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian di revisi dengan UU Nomor 32 tahun 2004, memberi kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus keuangan daerahnya sendiri karena mempunyai hak dan kewenangan untuk menggunakan sumber-sumber keuangan daerah yang sesuai dengan perkembangan yang ada di daerah, mungkin dengan sedikit campur tangan pemerintah pusat, dalam memenuhi infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi daerah.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Timur ini akan berpengaruh pada tingkat pendapatan perkapita penduduk. Jika laju Pertumbuhan Ekonomi lebih tinggi di bandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk berarti bahwa pembangunan di Lampung Timur secara makro regional telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Naiknya PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan jika di sertai dengan pengendalian jumlah penduduk, maka akan berdampak pada peningkatan pendapatan jumlah penduduk,

maka akan berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita. PDRB perkapita di peroleh dari nilai PDRB di bagi dengan jumlah penduduk.

Disamping itu juga kebijakan strategis untuk mempercepat Pertumbuhan Ekonomi (*growth acceleration*) ekonomi daerah adalah menciptakan dan mengembangkan iklim investasi yang menarik bagi investor. Ini penting karena investasi akan menciptakan *multiplier effect* bagi Pertumbuhan Ekonomi secara agregat melalui pemanfaatan secara optimal berbagai potensi yang ada di Kabupaten Lampung Timur. *Multifiler effect* lainnya dalam Investasi akan meningkatkan pemupukan modal, penyerapan tenaga kerja, mempercepat proses alih teknologi, serta meningkatkan nilai tambah bagi barang dan jasa.

Berdasarkan data potensi investasi yang ada, banyak peluang investasi yang bisa digarap di Kabupaten Lampung Timur. Misalnya sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan dan perkebunan, perikanan, peternakan, energi dan sumber daya mineral, industri pariwisata, perhubungan. Saat ini saja tercatat lebih dari 34 investor baik PMA dan PMDN yang sudah menanamkan investasinya di Kabupaten Lampung Timur seperti sektor pertanian dan perkebunan, penggemukan sapi dan unggas, nanas, tapioka, air mineral, pertambangan, perdagangan, dan masih banyak lainnya.

Ada beberapa langkah strategis yang dilakukan untuk menjadikan Lampung Timur sebagai daerah tujuan investasi yaitu :

1. Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana, serta fasilitas infrastruktur lainnya. Misalnya jaringan jalan dan transportasi untuk

membuka daerah terpencil, membangun terminal, pelabuhan, kelistrikan, jaringan irigasi. Investasi ini merupakan belanja pemerintah yang bersumber dari dana APBD maupun APBN.

2. Menyederhanakan birokrasi dan prosesur perizinan. Misalnya izin lokasi, hak atas tanah, IMB, HO/UUG, dan perizinan lainnya. Ini penting untuk menghindari biaya tinggi.
3. Mengembangkan teknologi tepat guna untuk pembangunan pertanian berbasis agrobisnis dan agro industri.
4. Pemberlakukan sistem insentif bagi investor.
5. Menciptakan rasa aman (*safeguarding*) bagi investor.
6. *Political-will* pemerintah daerah harus dijabarkan dalam bentuk komitmen bersama antara investor, pemerintah, dan masyarakat.
7. Membuat “cetak biru” tentang investasi yang membuat peta wilayah, data potensi, dukungan sarana dan prasarana. Cetak biru selain bersifat *guide (booklet)*, juga merupakan upaya promosi. Promosi misalnya melalui pameran, gelanggang dagang, workshop, dan seminar. Dan saat ini upaya promosi sudah gencar dilakukan melalui jaringan website milik pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
8. Melibatkan pihak perguruan tinggi melalui pemanfaatan hasil riset atau penelitian tentang berbagai potensi dan pengembangan investasi daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu pendapatan daerah selain dari dana perimbangan dan dana lain-lain pendapatan. PAD bertujuan memberi kewenangan kepada pemerintah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan

potensi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (UU No. 33/2004).

Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Soleh dan Rochmansjah (2010).

Kuncoro (2007) juga menyebutkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja Pemerintah Daerah paling tinggi hanya 20%. Kemandirian bagi daerah belum sepenuhnya terlaksana karena mereka masih menggantungkan adanya dana dari pemerintah pusat, khususnya DAU.

Harianto dan Adi (2007) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum sangat berpengaruh terhadap belanja modal. di beberapa daerah peran DAU sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan ini.

Kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi salah satu ukurannya adalah dengan melihat besarnya nilai PAD yang dapat dicapai oleh daerah tersebut. dengan PAD yang relatif kecil akan sulit bagi daerah tersebut untuk melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri, tanpa didukung oleh pihak lain (dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Propinsi).

Kabupaten Lampung Timur diharapkan dapat menjadi salah satu Kabupaten mandiri yang dapat mensejahterakan masyarakatnya serta dapat menjalankan rumah tangga pemerintahnya secara mandiri.

Di lihat dari perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kabupaten Lampung Timur tidak jauh berbeda dengan kabupaten-kabupaten lainnya yaitu proporsi terbesar untuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah yaitu dari sektor pajak.

Sedangkan proporsi terkecilnya yaitu dari sektor hasil kekayaan daerah. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah di perlukan adanya sumber keuangan yang cukup. Sumber-sumber keuangan yang ada di Kabupaten Lampung Timur yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah dapat di lihat dari tabel berikut :

**Tabel 1 Proporsi Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2001 – 2010 (dalam ribuan rupiah)**

Tahun	PAD	PD	RD	HKD	PLL
2001	2,903,890	1,275,000	1,350,890	0	278,000
2002	3,521,076	1,247,835	1,670,012	0	603,228
2003	6,742,736	2,720,815	1,758,869	0	2,263,051
2004	7,291,964	2,797,321	2,468,378	50,000	1,976,265
2005	7,499,519	2,499,142	2,854,410	25,000	2,120,967
2006	16,791,822	4,511,137	2,944,378	216,763	9,119,542
2007	30,311,592	6,270,970	3,675,619	458,431	19,906,572
2008	26,645,226	7,736,862	4,316,869	682,956	13,908,538
2009	20,985,633	8,326,730	2,841,747	813,566	9,003,588
2010	20,669,866	9,437,200	4,000,851	1,081,836	6,089,977
rata-rata	14,336,332	4,682,301	2,788,202	332,855	6,526,973

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur Tahun 2001 – 2010

Keterangan:

PAD = Pendapatan asli Daerah,

PD = Pajak Daerah,

RD = Retribusi Daerah,

HKD = Hasil Kekayaan Daerah,

PLL = Pendapatan lain-lainnya yang sah

**Tabel 2 Pertumbuhan PAD Kabupaten Lampung Timur  
Tahun Anggaran 2001-2010 (dalam ribuan rupiah)**

Tahun	PAD	Pertumbuhan (%)
2001	2,903,890	-
2002	3,521,076	21.25
2003	6,742,736	91.50
2004	7,291,964	8.15
2005	7,499,519	2.85
2006	16,791,822	123.91
2007	30,311,592	80.51
2008	26,645,226	-12.10
2009	20,985,633	-21.24
2010	20,669,866	-1.50
rata-rata	14,336,332	29,33

*Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur Tahun 2001 – 2010 (data diolah)*

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lampung Timur selama Sepuluh tahun terakhir di lihat dari tabel di atas, mengalami flutuasi cukup bervariasi pada tahun 2003 pendapatan yang diterima mencapai 91,50% senilai

6.742.736 dari tahun 2002 yang hanya memperoleh 3.521.076, pada tahun-tahun berikutnya PAD yang di terima tidak mengalami lonjakan yang signifikan, lonjakan PAD di Lampung Timur terjadi pada tahun 2006 mencapai 123,91% sekitar 16.791.822 yang pada tahun sebelumnya hanya mendapatkan 7.499.519 pada tahun 2009 PAD Lampung Timur mengalami penurunan sebesar 12.10 % atau 26.645.226 dari pendapatan yang di terima pada tahun 2008 hingga tahun 2010 PAD Lampung Timur mengalami penurunan sebesar 21,24% dari tahun 2009. Dengan rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebesar 14.336.332 atau sekitar 29,33%

**Tabel 3 Perkembangan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2001-2010 (dalam ribuan rupiah)**

Tahun	PD	PAD	Pertumbuhan (%)
2001	1,275,000	2,903,890	43,90
2002	1,247,835	3,521,076	35,43
2003	2,720,815	6,742,736	40,35
2004	2,797,321	7,291,964	38,36
2005	2,499,142	7,499,519	33,32
2006	4,511,137	16,791,822	26,86
2007	6,270,970	30,311,592	20,68
2008	7,736,862	26,645,226	29,03
2009	8,326,730	20,985,633	39,67
2010	9,437,200	20,669,866	45,65
Rata-rata	4,682,301	14,336,332	35,32

*Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur Tahun 2001 – 2010 (data diolah)*

Dari tabel di atas bahwa perkembangan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lampung Timur semakin naik secara nominal tetapi dalam



kontribusinya dalam persentase Pajak Daerah menurun, Kontribusi yang di berikan Pajak Daerah terhadap PAD yang paling tinggi terjadi pada tahun 2001 sebesar 43,90% sekitar 1,275,000 dari PAD 2,903,890. Sedangkan kontribusi yang terendah terjadi pada tahun 2007 yang hanya mencapai 20,68% sebesar 6,270,970 dalam penerimaan PAD 30,311,592. Setelah itu kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Lampung Timur selalu mengalami kenaikan hingga tahun 2010 yang mencapai 45,65%. Dengan perkembangan di setiap tahunnya mencapai 35,32%.

**Tabel 4 Perkembangan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2001-2010 (dalam ribuan rupiah)**

Tahun	RD	PAD	Pertumbuhan (%)
2001	1,350,890	2,903,890	46,52
2002	1,670,012	3,521,076	47,42
2003	1,758,869	6,742,736	26,08
2004	2,468,378	7,291,964	33,85
2005	2,854,410	7,499,519	39,14
2006	2,944,378	16,791,822	17,53
2007	3,675,619	30,311,592	12,12
2008	4,316,869	26,645,226	16,20
2009	2,841,747	20,985,633	13,54
2010	4,000,851	20,669,866	19,35
rata-rata	2,788,202	14,336,332	27,17

*Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur Tahun 2001 – 2010 (data diolah)*

Peranan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Lampung Timur selama sepuluh tahun terakhir mengalami secara nominal yang diperoleh selalu

meningkat hanya terjadi penurunan pada tahun 2009 sebesar 13,54% dari nilai kontribusi Retribusi sebesar 2.841.747 terhadap PAD yang mencapai 20.985.633, dan perkembangan terhadap persentase PAD cukup bervariasi peranan terbesar retribusi daerah terjadi pada tahun 2002 dengan nilai kontribusi 1.670.012 dengan PAD 3.521.076 dengan persentase pertumbuhan sebesar 47,42%. Pertumbuhan rata-rata persentase dari retribusi daerah Lampung Timur mencapai 27,17%

**Tabel 5 Perkembangan Kontribusi Dana Alokasi Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun 2001-2010 (dalam ribuan rupiah)**

Tahun	DAU	Pertumbuhan (%)
2001	168,987,983	-
2002	209,730,000	24.11
2003	241,020,000	14.92
2004	257,028,000	6.64
2005	282,847,000	10.05
2006	445,966,496	57.67
2007	487,543,000	9.32
2008	529,485,333	8.60
2009	537,536,893	1.52
2010	543,770,666	1.16
Rata-rata	370,391,537	13,39

*Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur Tahun 2001 – 2010 (data diolah)*

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Irawati,2008). Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa setiap tahunnya dana yang di anggarakan selalu meningkat dengan kontribusi terbesar pada tahun 2006 mencapai 57,67% sebesar 445.966.496 dengan rata-rata kenaikan 13,39% pertahunnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah bahwa dana pembangunan Kabupaten Lampung Timur yang ditentukan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), masih belum dapat untuk di ketahui untuk menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Timur, salah satu penyebabnya adalah rendahnya dukungan kapasitas fiskal daerah, alokasi belanja modal daerah, dan pembiayaan daerah yang terbatas.

Hal ini dapat dilihat dari peningkatan kapasitas fiskal daerah, alokasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum yang dari tahun ketahun peningkatannya hanya sedikit.

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Timur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap PDRB untuk mengetahui tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Timur:

1. Menganalisis Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB dalam Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Timur.

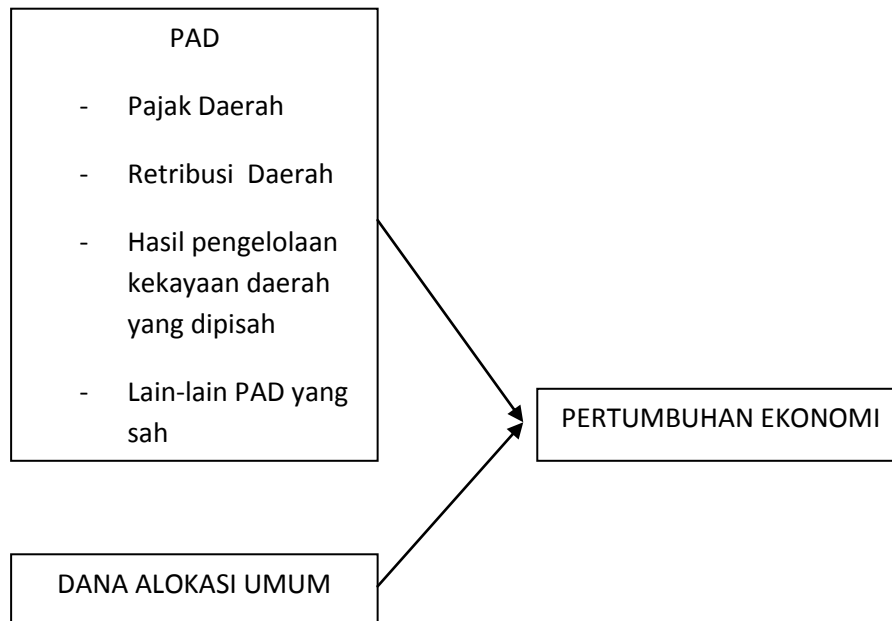
2. Menganalisis Dana Alokasi Umum terhadap PDRB dalam Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Timur.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum pada Kabupaten Lampung Timur selama tahun 2001-2010.
2. Mengetahui upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur yang terkait dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan khususnya mengenai komponen Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum pada Kabupaten Lampung Timur.

### E. Kerangka Pemikiran



Pada bagian ini dijelaskan dan di gambarkan kerangka pemikiran dari penelitian ini. Kerangka pemikiran penelitian menunjukkan adanya hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang diasumsikan berhubungan positif terhadap PDRB.

Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Untuk itu dalam masa desentralisasi seperti ini pemerintah daerah di tuntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PAD nya masing-masing dengan memaksimalkan sumber daya yang di miliki supaya bisa membiayai segala

kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD. Semakin baik PAD suatu daerah maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya.

Yang terakhir menjelaskan Dana Alokasi Umum (DAU) yang di asumsikan memiliki hubungan secara langsung terhadap PDRB. Dana Alokasi Umum merupakan salah satu dari Dana Perimbangan yang di sediakan oleh pemerintah pusat yang bersumber pada APBN, yang bertujuan untuk pemeratakan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pemerintah daerah yang kemampuan keuangannya lemah akan mengandalkan DAU untuk membiayai segala kegiatan pemerintahan, karena DAU juga merupakan salah satu sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Oleh karena itu, semakin kecil DAU yang di peroleh semakin kecil pula alokasi belanja modal daerah tersebut.

Berdasarkan penelitian Anis Setiyawati (2007) memperoleh pengujian secara langsung bahwa DAU menunjukkan pengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Jika ternyata PAD berpengaruh pada Pertumbuhan Ekonomi, maka terdapat kemungkinan kuat bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) juga berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi karena nilai DAU pada umumnya lebih besar di bandingkan kontribusi PAD.

## **F. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Di duga Pendapatan asli daerah secara langsung berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Timur.
2. Di duga Dana Alokasi Umum secara langsung berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Timur.